

# Faktor-faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan

## Oleh

Gogor Mustawa Zais  
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang  
Email : zaisgogor@yahoo.com Telp/Hp : 0852 732 514 37

## Info Artikel :

Diterima 18 Feb 2017  
Direview 22 Feb 2017  
Disetujui 10 April 2017

## ABSTRACT

*The objective of this study was to find out and analyze the impact of regional own revenue (PAD), general allocation fund (DAU) and special allocation fund (DAK) on capital expenditure (BM) in regencies/towns in South Sumatera Province for a period of 2010 to 2014. The data were analyzed by using multiple regression. There were four variables in this research. A dependent variable was capital expenditure (BM) and independent variables were regional own revenue (PAD), general allocation fund (DAU) and special allocation fund (DAK). The results showed that the regional own revenue and special allocation fund variables have positive and significant impact on the capital expenditure. This means that the higher the regional own revenue and special allocation fund, the regencies/towns increased the capital expenditure are also higher. General allocation fund do not have a significant effect on the capital expenditure (BM) in regencies/towns in South Sumatera Province for a period of 2010 to 2014.*

*Keywords capital expenditure, regional own revenue, general allocation fund, special allocation fund.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang baik berdasarkan penerapan prinsip *good governance* maka Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Reformasi pengelolaan keuangan harus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu wujud dari amanah pemerintah dan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja masing-masing satuan perangkat daerah.

Paradigma pengelolaan keuangan negara telah berubah secara mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001 yang berdampak pada perubahan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yang mana sebagian besar urusan fungsi pemerintahan yang menyangkut pelayanan dasar yang diserahkan kepada pemerintah daerah (Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah & Maryani,

2017). Desentralisasi pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah reformasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Sugiyanta, 2016). Hal tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya serta potensi kekayaan daerah tersebut (Sularso dan Restianto, 2011).

Menurut Tuasikal (2008) pembagian kewenangan tersebut sejalan dengan pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah dan tugas pembantuan. Sementara, sudut pandang keuangan negara menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. Artinya dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan mampu

mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah harus transparan dan akuntabilitas. Perwujudan pengelolaan keuangan yang relevan sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan akan melakukan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk pengawasan serta evaluasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai

Prinsipal (Situngkir, 2009).

Pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengalokasian anggaran publik seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Kondisi tersebut dapat tercermin dalam pos belanja modal pada suatu pemerintahan daerah. Menurut Wahyuningsih dan Widaryanti (2015) Alokasi anggaran belanja modal dalam APBD didasarkan pada kebutuhan daerah tersebut akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Sumatera Selatan sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam maupun manusia yang melimpah seharusnya pengelolaan keuangan menjadi perhatian yang penting dalam memaksimalkan sumber daya serta potensi keuangan yang ada. Kondisi yang terjadi pada anggaran 2012 menunjukkan bahwa Sumatera Selatan dalam kemampuan penyerapan anggaran dekonstrasi masih sangat rendah berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang menyoroiti kemampuan daya serap daerah terhadap anggaran dekonstrasi 2012.

Kondisi tersebut dapat dipahami dari fakta bahwa Pendapatan Asli Daerah serta Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat meskipun mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan peningkatan reliasi belanja modal pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber pendanaan pemerintah daerah tentang yang diatur berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pendapatan asli

daerah (PAD) merupakan pendapatan rutin yang diperoleh dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya (Wertianti & Dwirandra, 2013).

Dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dapat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Situngkir (2009) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus juga sumber pendanaan pemerintah yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari DAK yang diterima. Selain itu, daerah diwajibkan menyediakan 3% dari nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan lainnya.

Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal telah beberapa kali dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martini, Cipta dan Suwendra (2014) memberikan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Handayani dan Nuraina (2012) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Madiun. Penelitian lain juga dilakukan oleh Hartiningsih dan Halim (2015) yang memberikan hasil bahwa pajak daerah dan pendapatan lain-lain asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Serta, retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Riau. Berdasarkan fenomena yang ada serta hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten maka

peneliti akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Peranan Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah memiliki pengaruh yang besar sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat serta penilaian kinerja keuangan pada pemerintahan tersebut. Termasuk dalam mengetahui kebijakan belanja modal yang dilakukan pada periode tersebut sebagai cerminan kebijakan peningkatan infrastruktur dan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan. Hal ini dipahami karena keuangan negara harus dipertanggung jawabkan. Eksekutif sebagai pelaksana keuangan negara, harus memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Menurut Gaffikin (2008) menyatakan bahwa suatu hubungan keagenan terdapat adanya hubungan antara pihak pemilik (prinsipil) yang memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak lainnya yaitu manajemen (agen). Kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kepentingan masing-masing dalam waktu bersama.

Kontrak yang dilakukan menunjukkan kesepakatan antara prinsipal selaku pemberi amanah dan agen selaku penerima amanah, hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan. Dalam organisasi sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah, daerah bertindak sebagai agen selaku pihak yang menerima amanah rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan, dan rakyat yang diwakili oleh dewan perwakilan rakyat diposisikan sebagai prinsipal yang memiliki salah satu tugas utama untuk mengawasi aktivitas organisasi yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Tuasikal, 2008).

### Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetapberwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Wahyuningsih & Widaryanti, 2015). Belanja modal merupakan perhatian penting dalam pengelolaan keuangan negara, hal ini disebabkan belanja modal merupakan pos yang menampilkan alokasi sumberdaya keuangan merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya (Tuasikal, 2008).

Menurut Mardiasmo (2009) Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

### Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU No.33 Tahun 2004).

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatoris (*explanatory research*), yaitu menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2014.

Data penelitian ini adalah kuantitatif berupa data sekunder yaitu realisasi anggaran tahunan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah populasi yang memenuhi kriteria sebanyak 15 kabupaten/kota maka penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel sensus atau *sampling* jenuh, yaitu teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan persamaan sebagai berikut :

$$BM = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \varepsilon(1)$$

Keterangan

- BM : Belanja Modal
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Umum
- $\beta_0$  : Koefisien Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$  : Koefisien Variabel Independen
- $\varepsilon$  : *Error term*

Model analisa data ini memerlukan uji asumsi klasik untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi aktual (nyata). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari: ujinormalitas, uji autokorelasi, ujimultikolinearitas, danheterokedastisitas. Hasil pengujian statistik penelitian ini dapat diketahui berdasarkan kriteria statistik yang meliputi :

1. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh semua variabel independen terhadap dependen.
2. Uji T, Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui variabel independen yang terdapat dalam model secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
3. Uji F, Sedangkan Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Pada tabel 1 disajikan ringkasan hasil analisis statistik deskriptif untuk keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan menampilkan karakteristik sampel yang digunakan, yaitu meliputi jumlah sampel penelitian (N), rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi untuk masing-masing variabel.

**Tabel.1**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Deviation
PAD	75	9,21	13,51	10,8292	,87468
DAU	75	11,29	14,00	12,9709	,46138
DAK	75	,00	11,90	10,5502	1,35787
BM	75	10,21	14,14	12,5457	,64331
ValidN (Listwise)	75				

Sumber: *Data Sekunder yang Diolah, 2017.*

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 data. Tabel 1 di atas juga menunjukkan bahwa rata-rata masing-masing variabel berada pada angka positif.

*Kolmogorov-Smirnov* di atas diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,880. Hal ini menunjukkan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji Statistik yang digunakan untuk menguji normalitas adalah *One - Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test*. Berdasarkan hasil uji *One-Sample*

#### Uji Multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Suatu

model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai nilai *tolerance* di atas 0.1 dan nilai VIF di bawah 10. Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* di atas 0.1 dan nilai VIF bawah angka 10. Hal ini menunjukkan dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Berdasarkan analisa data menunjukkan bahwa semua variabel bebas tidak signifikan yaitu lebih dari 0,05 atau 5 %. Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam varian kesalahan.

**Tabel.2**  
**Uji Heterokedastisitas**

Model	Understandaized Coefficients		Standaized Coefficient	T	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	,431	1,047		,412	,682
PAD	,094	,054	,264	1,731	,088
DAU	-,074	,106	-,111	-,704	,484
DAK	-,013	,028	-,056	-,459	,648

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2017.

a. Dependent Variable: RES\_2

Hal ini mengindikasikan bahwa keempat variabel independen (Belanja modal, Dana alokasi Umum dan Dana alokasi khusus) benar-benar mempengaruhi belanja modal dan tidak berpengaruh terhadap variabel residualnya, sehingga penelitian ini terjadi homoskedastisitas.

dilihat dalam tabel DW tabel pada signifikansi 0,05 dengan n (jumlah data) = 75 dan k' (jumlah variabel-1) = 3. Maka, didapatkan nilai DL adalah 1.5432 dan DU adalah 1.7092. Nilai ini terletak diantara  $DU < DW < 4-DU$  yaitu  $1,7092 < 1.946 < 2.2908$  sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

**Uji Autokorelasi**

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi akan dilakukan pengujian *Durbin-Watson (DW test)*. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh adalah sebesar 1,946. Untuk nilai DL dan DU dapat

**Model Regesi Berganda yang Terbentuk**

Metode analisa data untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan dependen pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

**Tabel.3**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Understandaized Coefficients		Standaized Coefficient	t	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	6,969	1,613		4,320	,000
PAD	,485	,083	,659	5,825	,000
DAU	-,049	,163	-,035	-,299	,766
DAK	,091	,042	,191	2,133	,036

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  
**DPR = 6.969 + 0.485 PAD – 0.049 DAU + 0.091 + ε.**(2)

**Koefisien Determinasi**

Hasil analisa data yang dilakukan maka koefisien determinasi pada penelitian ini diketahui berdasarkan Tabel 4 Sebagai berikut:

**Tabel.4**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	,690 <sup>a</sup>	,475	,453	,475666
---	-------------------	------	------	---------

Berdasarkan hasil analisa data diperoleh hasil koefisien determinasi *adjusted R<sup>2</sup>* pada perusahaan sampel sebesar 0,453. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki kontribusi sebesar 45,3 persen terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan sisanya sebesar 54,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian.

#### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji statistik F dapat dilihat bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 21,452 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian, tingkat signifikansi yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal (BM), sehingga dapat dipahami bahwa variabel meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM).

#### Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

##### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penghitungan uji-t diperoleh nilai t hitung sebesar 5,825 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung (5,825) lebih besar dari nilai t tabel (1,993) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,0 % maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2014. Berdasarkan hasil analisa data tersebut maka diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah belanja modal yang akan dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan karena pendapatan asli daerah yang meningkat juga menyebabkan peningkatan dalam jumlah belanja modal yang akan dilakukan.

Kondisi ini dapat dipahami karena tingkat kemandirian keuangan dalalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat berkaitan dengan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber

pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengakomodasikan terhadap kebutuhan masyarakat daerah setempat dalam pembangunan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan daerah secara leluasa karena membiayai belanja dari pemerintah selain dari dana perimbangan dari pemerintah pusat juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

##### Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penghitungan uji-t diperoleh nilai t hitung sebesar -,299 dengan nilai signifikansi sebesar 0,766. Karena nilai t hitung (0,299) lebih kecil dari nilai t tabel (1,993) dan nilai signifikansi lebih besar dari 5% yaitu sebesar 76,6 % maka Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2014.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel dana alokasi umum tidak mempengaruhi yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada wilayah di Provinsi Sumatera Selatan bahwa, terdapat kabupaten/kota yang belum merata pembangunan serta pelayanan publiknya. Namun, penelitian ini melihat hasil bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa pemanfaatan secara efektif dana alokasi umum dalam jangka panjang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah transfer yang dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Kondisi ini menjelaskan bahwa kemandirian daerah tidak mengalami peningkatan, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.

##### Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Analisa data yang telah dilakukan maka diperoleh nilai t hitung sebesar 2,133 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. Karena nilai t hitung (2,133) lebih besar dari nilai t tabel (1,993) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 3,6 % maka Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2014. Hasil analisa data tersebut menunjukkan bahwa indikator Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah belanja modal yang akan dikeluarkan. Hal tersebut disebabkan dana alokasi khusus yang meningkat maka belanja modal juga mengalami peningkatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Kondisi yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal karena dana ini hanya dapat digunakan untuk keperluan khususnya tertentu saja terutama untuk pembiayaan belanja modal. Dana Alokasi Khusus tersebut digunakan untuk Dana Reboisasi sebagaimana UU Nomor 33 Tahun 2004, selain itu dialokasikan untuk infrastruktur air bersih serta bidang kelautan dan perikanan, dan pada tahun 2005 terdapat penambahan bidang, yaitu pertanian. Selanjutnya, pada tahun 2006 ditambah pada bidang lingkungan hidup. Bahkan pada tahun 2008 bertambah dua bidang, yaitu bidang Keluarga Berencana (KB) dan bidang kehutanan. Selain itu, komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diwujudkan dengan mengalokasikan dana pendamping dalam APBD, minimal 10 persen dari besaran alokasi DAK yang diterima.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2014.

### Saran

Penulis memberikan saran kepada para masyarakat luas dan peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan yang akan dilakukan Kabupaten/Kota terhadap realisasi belanja modal yang merupakan bentuk komitmen peningkatan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat dapat tercermin juga melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga, realisasi penerimaan dari dua bidang tersebut perlu terus ditingkatkan dan didorong untuk kesejahteraan masyarakat luas pada suatu daerah.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pembahasan penelitian yang akan dilakukan dengan cara menambahkan pembahasan kebijakan pembelanjaan, serta menambah variabel-variabel selain dari pos-pos penerimaan pendapatan yang dapat mempengaruhi kebijakan belanja modal pada suatu daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gaffikin, Michael. 2008. *Accounting Theory: Research, Regulation and Accounting Practice*. Frenchs Forest, NSW: Pearson Prentice Hall.
- Handayani, Dwi & Elva Nuraina. 2012. 'Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun', *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vo.1, No. 1 Oktober 2012, hal.1-12.
- Hartiningsih, Halim & Edyanus Herman Halim. 2015. 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau', *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, Volume 7, No.2 Mei 2015, hal. 258-269.
- Mardiasmo, Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Martini, Ni Luh Dina Selvia., Wayan Cipta & I Wayan Suwendra., 2014. 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 – 2012', *Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 Tahun 2014, hal.1-10
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Realisasi APBD Tahun 2010-2014 dalam: [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

- Rusmana, Oman., Dyah Setyaningrum., Yuliansyah., & Maryani. 2017. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Situngkir, Anggiat. 2009. 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara', *Tesis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Sularso, Havid & Yanuar E. Restianto. 2011. 'Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah', *Jurnal Media Riset Akuntansi*, Volume 1, Nomor 2 Agustus 2011, hal. 109-124.
- Tuasikal, Askam. 2008. 'Pengaruh Dau, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia', *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2008, hal.142-155.
- Wahyuningsih, Panca & Widaryanti. 2015. 'Peningkatan PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah', *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Ekonomi Bisnis*, Volume 12, Nomor 1 Maret 2015, Hal. 33-48
- Wertanti, I G A Gede & A.A.N.B Dwirandra. 2013. 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 4, Nomor 3, hal. 567-584